



**UNIVERSIDADE DILI
TIMOR-LESTE**

MASA DEPAN YANG AMAN

Suatu laporan kelompok diskusi terfokus mengenai perilaku publik
sehubungan dengan Pertahanan dan Keamanan Timor Leste

oleh

Julio Tomas Pinto, MA
Pusat Penelitian dan Pengkajian Strategis
Av. Bispo de Medeiros Ex. Departemen Penerangan Dili Timor-Leste

Februari 2003



Di cetak dengan bantuan dana dari the National Democratic Institute.

DAFTAR ISI

TERMINOLOGI YANG DIGUNAKAN DALAM LAPORAN INI	3
KATA PENGANTAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
TEMUAN-TEMUAN UTAMA	7
<i>Suasana Nasional</i>	7
<i>Ancaman-ancaman</i>	8
<i>Tanggungjawab Keamanan Lokal</i>	11
<i>Tanggungjawab Keamanan Distrik dan Nasional</i>	12
<i>Fungsi F-FDTL dan PNTL</i>	15
<i>Pembayaran Militer dan Polisi</i>	17
<i>Militer, Polisi dan Politik</i>	18
IMPLIKASI-IMPLIKASI DAN PENGAMATAN TERHADAP TEMUAN-TEMUAN KELOMPOK TERARAH	20
<i>Implikasi bagi Pemerintah</i>	20
<i>Implikasi bagi Kepolisian RDTL (PNTL)</i>	20
<i>Implikasi bagi F-FDTL</i>	21
<i>Implikasi bagi Wakil Rakyat</i>	22
<i>Implikasi bagi keamanan dan Pertahanan</i>	22
<i>Implikasi bagi PKF dan UNPol</i>	22
APPENDIKS	23
<i>Appendiks A – Catatan Mengenai Metodologi</i>	23
Diskusi Kelompok Terfokus	23
Penelitian <i>focus group</i> NDI di Timor Lorosae	23
Laporan ini	23
Transkrip	23
Para fasilitator	24
Penghargaan	24
<i>Appendiks B – Profil Peserta</i>	25

TERMINOLOGI YANG DIGUNAKAN DALAM LAPORAN INI

Chefe de Aldeia	Kepala dusun [POR]
Chefe de Suco	Kepala Desa [POR]
CNRT	Dewan Nasional Perlawanan Timor Leste
CPD-RDTL	Komite Pertahanan Semesta RDTL
FALINTIL	Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Timor Leste [POR]
F-FDTL	FALINTIL-Angkatan Pertahanan Timor Leste
FRETILIN	Barisan Revolusi untuk Pembebasan Timor Leste
PKF	Pasukan Penjaga Perdamaian PBB
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PNTL	Polisi Nasional Timor Leste (juga dikenal sebagai TLPS)
RDTL	Republik Demokratik Timor Leste
Suco	Desa [POR]
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TROPAS	Militer Timor Leste pada masa Portugis.
UN	United Nations atau PBB
UNAMET	Misi PBB di Timor Leste
UNDIL	Universitas Dili
UNMISET	Misi Dukungan PBB di Timor Leste
UNPOL	Kepolisian PBB (sebelumnya dikenal sebagai CivPol)
UNTAET	Pemerintahan Transisi PBB di Timor Leste

KATA PENGANTAR

Laporan ini didasarkan atas analisa dari Diskusi Kelompok Terfokus yang dilaksanakan oleh *National Democratic Institute for International Affairs* (NDI) pada bulan Mei-Juni 2002, namun disatukan dengan analisa situasi pertahanan dan keamanan di Timor Leste pada saat ini. Temuan penelitian diserahkan kepada Bpk. Julio Tomas Pinto, MA, dari Universitas Dili untuk meningkatkan debat di kalangan cendekiawan dan publik demi lingkungan pertahanan keamanan Timor Leste sendiri yang semakin kritis artinya. Ini merupakan hasil kerja dari Bpk. Pinto yang bertanggung jawab penuh atas hasil analisisnya.

Suara-suara yang ada merupakan pendapat dari masyarakat awam di seluruh pelosok Timor Leste. NDI tidak menggunakan kendali editorial atas laporan ini. Namun, NDI menyediakan laporannya kepada penulis dan telah menyediakan dana untuk menerjemahkan dan mempublikasikan dokumen ini.

Pada 16 bulan mendatang Timor Leste akan menempuh transisi terakhir menuju kemerdekaan dengan tanggung jawab eksekutif dan operasional untuk urusan pertahanan eksternal dan keamanan internal negara yang diserahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Republik Demokratik Timor Leste. Pasukan penjaga perdamaian akan menyerahkan wewenang secara penuh pada bulan Juni 2004 dan Polisi PBB pada bulan Januari 2004. Bagaimanapun transisi ini sudah berjalan dengan lima distrik yang telah diserahkan kepada PNTL, dan F-FDTL telah mengemban tanggung jawab atas Lospalos dan Ermera pada aksi Astage yang baru saja terjadi. Situasi keamanan yang berkembang cepat menuntut supaya transisi ini disertai dengan meningkatnya signifikansi perdebatan nasional.

Kami berharap supaya laporan ini dan penelitian yang mendasarinya dapat bermanfaat bagi perdebatan kebijakan dan mendorong pembuat kebijakan untuk melaksanakan proses konsultasi yang lebih luas pada bulan-bulan mendatang. Ini bukan merupakan hal yang definitif, namun diharapkan dapat menjadi katalisator bagi diskusi dan perdebatan yang lebih mendalam.

Laporan ini telah dipublikasikan dalam empat bahasa supaya temuannya dapat dinikmati oleh masyarakat Timor Leste dan komunitas internasional Timor Leste secara luas. Mereka yang berpartisipasi dalam penelitian ini memahami bahwa pandangan mereka dapat disampaikan kepada pembuat kebijakan Timor Leste pada semua tingkatan. Penjabaran mengenai metodologi laporan ini dapat dibaca pada Apendiks.

PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN STRATEGIS
dan
NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE TIMOR LESTE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setelah kemerdekaan Timor Leste tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste merasakan begitu penting untuk siap menerima transformasi yang sedang dan akan diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada rakyat Timor Leste. Salah satu bidang yang akan ditransformasikan kepada rakyat Timor Leste adalah bidang pertahanan dan keamanan. Sejak masuknya INTERFET ke Timor Leste empat tahun silam sampai tanggal 30 Juni 2004, sistem pengamanan dan pertahanan negara Timor Leste masih melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Timor Leste. Tetapi dengan adanya banyak kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Timor Leste dan United Nations Mission Support for East Timor (UNMISSET) maka secara defakto pada tanggal 30 Juni 2004 seluruh unsur PBB akan meninggalkan negeri ini termasuk United Nation Police (UNPOL) sampai tingkat minimal tinggal 100 orang yang bertugas sebagai penasehat di beberapa tempat yang dibutuhkan. Dalam kondisi seperti ini berarti bahwa seluruh komponen bangsa ini dibebani tanggungjawab yang tak ringan untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah ini.

Riset yang dilakukan dengan metodologi focus group lebih lanjut menunjukkan bahwa jika dimintai pendapat dan masyarakat Timor Lorosae siap memberikan pendapatnya dan ingin agar pertahanan dan keamanan betul-betul diciptakan dalam seluruh wilayah Timor Leste.

- Para Responden dalam penelitian Mei 2002 mengatakan mereka merasa aman. Tidak seperti yang pernah mereka rasakan selalu dalam ancaman baik fisik maupun psikis. Aman bagi mereka adalah bebas kepergian tanpa ada teror dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok dan orang lain.
- Para responden merasa bahwa keamanan yang kini mereka rasakan hanya karena masih adanya lembaga-lembaga keamanan internasional. Dikhawatirkan keamanan ini akan pergi dan sirna bersamaan dengan ditinggalkannya Timor Leste oleh lembaga-lembaga keamanan internasional tersebut.
- Para responden merasa bahwa masa depan keamanan nasional adalah ditangan F-FDTL dan PNTL. Mereka merasa bahwa kedua lembaga tersebut dapat memberikan jaminan keamanan tersebut.
- Keamanan yang sangat potensial menurut para responden adalah keamanan di lintas perbatasan sehingga diperlukan sebuah jaminan keamanan di daerah-daerah yang perbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Termasuk masih adanya pengungsi di daerah NTT merupakan ancaman tersendiri terhadap keamanan wilayah Timor Leste.

- Pada umumnya masyarakat menginginkan terciptanya keamanan di distrik maupun nasional dengan tugas bahkan mereka juga menginginkan kepala desa dan lembaga lain di desa dapat diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keamanan yang terjadi di desa dengan demikian berarti mereka mampu menyelesaikan tanpa harus mendatangkan polisi.
- Para responden mengatakan bahwa dimasa yang akan datang ancaman yang sangat membahayakan masa depan bangsa adalah ancaman internal. Banyaknya kelompok-kelompok berseragam yang selalu mengganggu stabilitas dalam negeri. Kasus eks-Falintil yang sampai sekarang belum dituntaskan oleh pemerintah adalah satu persoalan yang bakal mewarnai masa depan Timor Leste lima tahun akan datang.
- Para responden melihat bahwa salah satu ancaman yang bakal membahayakan masa depan bangsa adalah adanya perpecahan antar elit-elit politik. Para elit politik harus menyamakan visi dan misi dalam persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa ini.
- Masyarakat juga menginginkan peran yang lebih besar diberikan kepada PNTL dan F-FDTL untuk menjaga negara RDTL tetapi mereka juga tidak menginginkan militer dan polisi memihak partai tertentu dan mereka berharap militer dapat netral dan independen.
- Para responden memberikan solusi untuk mengatasi kerawanan daerah maka Chefe de Suco dapat diberikan kewenangan untuk mengatasi kasus yang terjadi di tingkat lembaga yang paling memiliki rakyat banyak atau desa. Karena sampai saat ini polisi dengan jumlah yang terbatas sulit untuk menjangkau sampai ke desa-desa yang terpencil.
- Pada umumnya para responden melihat pentingnya PNTL dan F-FDTL tidak melibatkan diri dalam bisnis dan politik praktis. Jika mereka terlibat dalam bidang yang bukan tugas dan gengsi mereka maka mereka akan lupa akan tugas utamanya yakni menciptakan keamanan dalam negeri bagi PNTL dan pertahanan negara dari serangan luar bagi F-FDTL.

Data yang terkumpul dalam laporan ini menunjukkan bahwa rakyat Timor Leste secara umum menginginkan terciptanya suatu sistem pertahanan dan keamanan yang dapat mempertahankan eksistensi negara RDTL. Dengan laporan ini, Pusat Penelitian dan Pengkajian Strategis (UNDIL) berharap agar semua pihak seperti NGO, lembaga pendidikan, partai politik, dan masyarakat sipil dapat memberikan kontribusi dengan melakukan debat terutama lewat lembaga legislative atau parlemen agar memberikan solusi yang konstruktif bagi prospek pertahanan dan keamanan nasional.

TEMUAN-TEMUAN UTAMA

Suasana Nasional

Perkembangan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dalam bidang keamanan mulai menunjukkan fenomena yang sangat mengembirakan karena keamanan masyarakat sedang tercipta walau dengan tingkat perkembangan yang agak lambat. Rakyat Timor Leste berharap dalam kehidupan sehari-harinya dapat tercipta situasi yang nyaman dan stabil guna membangun kehidupan yang lebih baik. Keamanan yang terjamin tidak hanya tercipta ketika Perserikatan Bangsa Bangsa bertugas di Timor Leste tetapi juga pada saat PBB meninggalkan daerah ini.

“Kami masyarakat Timor Lorosae saat ini merasa aman karena PBB ada di sini, ada PKF, CIVPOL bekerja sama dengan F-FDTL dan PNTL. Yang kami ragukan adalah pada masa yang akan datang bila pasukan PBB di tarik dari Timor Lorosae sebab saat ini di beberapa tempat ada kelompok-kelompok orang yang mengadakan latihan kemiliteran dan kenaikan bendera Timor Lorosae dengan seenaknya tanpa persetujuan pemerintah setempat” [Guru, 40, Quelicai]

Terciptanya stabilitas nasional merupakan faktor yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan elemen-elemen keamanan dan pada dataran ancaman eksternal dapat dilakukan dengan memanfaatkan posisi F-FDTL sebagaimana diamanatkan konstitusi Timor Lorosae. Bantuan internasional dalam menciptakan keamanan dan pertahanan tanpanya sedikit demi sedikit mulai di kurangi dengan semakin memberikan peluang kepada lembaga F-FDTL yang bertugas mulai dari Lospalos kemudian pada tahun 2004 akan berakhir di perbatasan Indonesia dan Timor Lorosae. Stabilitas yang diciptakan PBB di Timor Leste membuat masyarakat tergantung kepada kekuatan bantuan internasional terutama CIVPOL dan TLPS sehingga mereka berharap ketenangan dapat diciptakan oleh mereka.

“Kami merasa aman, tidak seperti dulu lagi, karena ada CIVPOL dan PNTL maka kami sekarang merasa aman”, anggota masyarakat, 38, Salele.

Kepercayaan rakyat terhadap UNPol dan PNTL merupakan ekspresi langsung yang mereka rasakan selama ini dan tentu dengan demikian harapan ini dapat diperhatikan dan ditingkatkan pelayanan keamanan pada masyarakat. Masyarakat masih menaruh harapan yang berat kepada unit-unit pertahanan dan keamanan yang pada gilirannya akan membentuk opini dan image yang baik bagi lembaga-lembaga seperti UNPol dan PNTL. Masyarakat ingin setiap aktifitasnya tidak terganggu baik itu tekanan keamanan internal maupun eksternal sehingga mereka memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Jaminan keamanan diharapkan diberikan terus

oleh lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan faktor itu sehingga mereka merasa aman.

“Arti aman bagi saya adalah bebas kemana saja. Tidak lagi ada terror, intimidasi dan lain sebagainya karena dijamin oleh PKF, CIVPOL, FDTL dan PNTL”, Mahasiswi, 21, Dili

Pelayanan yang maksimal tentang infrastruktur bagi masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah transisi dan juga pemerintahan Timor Leste tetapi tampaknya masih banyak kelemahan yang ditemukan di dalam proses pembangunan kembali, sehingga adalah tanggungjawab semua pihak untuk menciptakan dan melengkapi kekurangan ini dan termasuk juga dalam sektor keamanan.

“Sekarang saya sudah merasa aman namun secara umum masih banyak kekurangan yang masyarakat alami dalam kehidupan sehari-hari seperti listrik tidak menyala atau kadang-kadang hanya dua kali dalam seminggu dan hasil-hasil pertanian seperti padi, jagung dan ubi kayu tidak berharga yang membuat masyarakat menderita”, petani, 40, Bobonaro.

Tetapi bagi masyarakat yang secara geografis bermukim di sekitar perbatasan sangat mengkhawatirkan jaminan keamanan karena adanya aktifitas sekelompok milisi yang keluar masuk wilayah teritorial Timor Lorosae dengan bebas dan mereka mengganggu sistem pengamanan masyarakat Timor Lorosae di sekitar perbatasan.

“Kami merasa belum aman karena para pengungsi sekarang ini keluar masuk wilayah Timor Lorosae dengan bebas, jadi kami sebagai masyarakat kecilyang ada di dekat perbatasan kami tidak bisa tidur dengan tenang juga tidak bisa melakukan aktifitas kami sehari-hari dengan aman”, petani, 60, Bobonaro

Ancaman-ancaman

Dari berbagai pemikiran tentang ancaman kita dapat melihat banyak ragam ancaman. Jika kita memperhatikan pakar tentang Negara Aristoteles dia mengatakan bahwa Negara itu eksistensinya bagaikan manusia. Negara lahir, tumbuh berkembang dan dewasa kemudian Negara itu akan tua dan pada akhirnya Negara itu akan mati atau hilang dari peredaran. Pemikirannya ini cobalah dilihat dalam konteks Timor Lorosae. Salah satu faktor hilangnya Negara adalah ketika Negara menghadapi ancaman. Ancaman ada beragam tetapi pada hakekatnya ancaman adalah internal dan eksternal. Untuk mengnadapi ancaman internal sudah sepantasnya dilakukan pendekatan ekonomis yang akan mengantarkan kesejahteraan bagi warga Negara sebagaimana tujuan lahirnya Negara.

“Ancaman internal yaitu kelompok menamakan diri Isolado dan pemuda penganggur sedangkan ancaman eksternal yaitu oleh milisi-milisi pro-Jakarta”, mahasiswi, 23, Dili.

Masyarakat kebanyakan melihat tidak ada lagi ancaman dari pihak eksternal umpamanya invasi dari negara-negara tetangga seperti Australia dan Indonesia. Justru sekarang masyarakat menyaksikan latihan-latihan di luar lembaga kemiliteran secara resmi. Eksistensi lembaga resmi sebagai lembaga pertahanan seperti F-FDTL dan PNTL sangat dibutuhkan masyarakat local.

“Ancaman paling besar adalah ancaman internal, artinya konflik antara orang Timor Lorosae sendiri yang dapat mengundang orang luar untuk masuk Timor Lorosae”, guru, 28, Quelicai.

Kemudian dewasa ini setelah terjadi pembumi hangusan mulai lahir kesadaran dalam masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungannya sendiri dengan mengaktifkan partisipasi mereka. Kesadaran akan pentingnya partisipasi warga dalam pembangunan keamanan lingkungan disebabkan oleh masyarakat mulai merasa bahwa jika terjadi kekacauan keamanan dengan rendahnya kekuatan bersenjata jelas sangat sulit maka keaktifan masyarakat dirasa penting demi masa depan bangsa.

“Bagi kami keamanan internal dirasa baik karena kalau ada sesuatu yang terjadi di kampung kami, masyarakat sendiri yang datang langsung ke Chefe Aldeia. Mereka langsung turun ke lokasi bertemu kami dan kami melihat bahwa polisi Timor Lorosae langsung bekerja”, warga, 38, Salele.

Pertentangan politik, perdebatan panjang antara elit politik dikhawatirkan menjadi semua ancaman internal bagi keamanan nasional. Kekhawatiran rakyat itu merupakan ekspresi atas pengalaman Timor Lorosae pada beberapa tahun sebelumnya. Sejarah Timor Lorosae membuktikan bahwa pada tahun 1974 ketika partai-partai politik berdiri beriringan dengan munculnya perbedaan pandangan politik antara elit politik. Akhir dari perbedaan politik itu adalah perang saudarapun meletus antar pendukung partai masing-masing. Pengalaman tersebut akhirnya melahirkan rasa was-was rakyat terhadap perdebatan panjang antara elit politik sekarang ini. Perang saudara tersebut sampai berdampak pada banyaknya rakyat sipil tak berdosa yang menjadi korban perang dalam invasi militer Indonesia. Eksistensi pengungsi sendiri bagi masyarakat adalah ancaman tersendiri karena mereka akan merada dalam satu daratan langsung dengan Timor Lorosae dengan status Negara yang berbeda. Eksistensi pengungsi itu bukan ancaman bagi wilayah teritorial Timor Lorosae. Sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk membangun markas militer di perbatasan dan membuka rekonsiliasi antar warga Timor maupun dengan rakyat Indonesia.

“Ancaman internal karena belum adanya persatuan dan kesatuan antar para elit politik di Timor Lorosae, mereka saling berebut jabatan dan lain sebagainya sehingga membuat Negara inimenjadi tidak aman. Sedangkan ancaman eksternal adanya ancaman luar negeri yang disebabkan masih adanya pengungsi Timor Lorosae di Timor Barat”, petani, 48, Lospalos.

Selain itu ancaman internal akan sangat membahayakan eksistensi Negara karena gesekan kepentingan antar elit politik dalam memperebutkan kekuasaan. Timor Lorosae memiliki pengalaman tersendiri ketika melihat partai-partai politik berkonflik pada tahun 1974. Memuncaknya konflik partai politik itu disebabkan oleh karena rendahnya pemahaman politik elit sehingga mereka mengutamakan egoisme politik dalam kekuasaan.

“Ancaman terbesar terhadap keamanan bisa timbul dalam kelompok internal.... mungkin ancaman itu timbul karena kesenjangan sosial dan kursi kepemimpinan” petani, 32, Ossu.

Adalah tanggungjawab pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga negaranya. Dengan jaminan keamanan warga Timor Lorosae dapat membangun daerahnya dari kehancuran, dengan jaminan keamanan rakyat akan membangun demokrasi bagi negaranya. Kekerasan yang menjadi kehidupan sehari-hari pada zaman Indonesia harus dihilangkan dengan maksud perdamaian segera diciptakan demi masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik adalah ketika kemiskinan dihilangkan dan mengangkat harkat dan martabat rakyat secara keseluruhan.

“Kami rakyat sekarang merasa senang tidak seperti ketika zaman Indonesia dengan adanya pembunuhan, perkosaan dan kami tidak ingin lagi hal itu diera kemerdekaan ini”, petani, 56, Cailaco.

Terciptanya keamanan di perbatasan umumnya menjadi bahan perbincangan dan harapan masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan situasi keamanan di perbatasan. Keadaan geografis yang perbatasan langsung dengan Indonesia menjadi kendala tersendiri bagi terciptanya stabilitas di daerah-daerah yang berhubungan dengan NTT seperti Suai, Bobonaro dan lainnya. Kekhawatiran bagi rakyat karena dengan gangguan yang diciptakan TNI dengan menggunakan agen-agen Milisi atau orang yang mengetahui persis wilayah ini untuk menciptakan kerawanan bagi masyarakat. Sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menciptakan situasi aman tersebut bagi masyarakat.

“Kita ketahui bahwa daerah perbatasan kita tidak dibatasi oleh lautan namun hanya dibatasi oleh daratan. Bila kita mau berkunjung ke Indonesia hanya membutuhkan waktu sekitar tidak sampai 2 jam dan sebaliknya bila musuh masuk ke wilayah kita juga tidak sampai 2 jam karena letak wilayah kita sangat berdekatan. Jadi hal inilah yang akan

menjadi masalah bagi kami. Jangan sampai mereka (musuh) masuk membawa bom atau senjata tanpa sepengetahuan pihak keamanan maka kami yang akan menjadi korban”, Petani, 40, Bobonaro.

Tanggungjawab Keamanan Lokal

Dalam negara manapun secara umum keamanan dapat diciptakan dengan memperhatikan aspirasi wilayah bersangkutan. Berdasarkan konstitusi Timor Lorosae bahwa keamanan internal adalah tugas kepolisian sehingga terciptanya rasa aman dalam masyarakat adalah termasuk bagian dari tugas kepolisian. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang menangani keamanan dalam negeri polisi harus independen. Polisi yang independen adalah polisi yang tidak dapat dipolitisir oleh kekuatan eksternal, polisi yang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak memihak tetapi bertujuan menegakan hukum secara keseluruhan. Untuk menangani keamanan lokal di daerah masing-masing, polisi dapat menempatkan anggotanya yang bertugas mengkoordinir bersama masyarakat di daerah tersebut. Kemudian untuk mengatasi keamanan lokal, Timor Leste bisa menerapkan model keamanan partisipatif yang biasanya masyarakat sendiri yang berpartisipasi untuk menciptakan keamanan dengan melibatkan lembaga-lembaga adat dan pemerintah. Masyarakat kadang ragu terhadap kemampuan pemerintah dan lembaga di pedesaan dalam menjaga keamanan di desa.

“Kalau terjadi kekerasan di desa kami masih menghargai tokoh adat, kalau tidak selesai maka masalahnya akan kami sampaikan juga pada Chefe Aldeia (RK). Kalau memang bisa diselesaikan maka tiak perlu ke polisi lagi karena berarti kamipun mampu menyelesaikannya”, warga, 38, Salele.

Partisipasi aktif dalam menciptakan keamanan di desa-desa di Timor Lorosae adalah harapan semua pihak dimana struktur pemerintah belum efektif secara maksimal. Persoalan partisipasi aktif ini sudah dikenal sejak Indonesia masih bercokol dalam wilayah ini. Ketika itu kita kenal dengan istilah sistem pertahanan keamanan rakyat yang menuntut partisipasi rakyat secara langsung. Tetapi tentu pasca kemerdekaan ini Timor Lorosae tidak seharusnya meniru secara total model itu tetapi harus di adakan sedikit modifikasi yang berarti penyesuaian terhadap perubahan zaman yang terjadi dewasa ini. Pergeseran harus terjadi dari budaya represif Indonesia menjadi budaya pendekatan manusiawi yang efektif dan menegakkan hak asasi manusia.

“Keamanan di Kampung atau desa dimana dia tinggal harus percaya pada diri sendiri untuk menjaga keamanan walaupun ada polisi dan F-FDTL, dan kita harus ikut berpartisipasi dalam kelompok keamanan untuk menjaga kampung atau desa dimana kita tinggal sehingga bisa terjadi ancaman bisa diatasi sendiri bukan seperti zaman Indonesia

polisi tinggal di kampung-kampung sebab mereka kebanyakan tinggal di distrik-distrik saja”, perawat, laki, 30, Manufahi.

Masyarakat Timor Lorosae sudah harus mempersiapkan diri untuk menerima transfer keamanan dari UN Police dan PKF karena diperkirakan pada pertengahan tahun 2004 kita akan menerima keseluruhan tanggungjawab keamanan untuk mempertahankan diri sendiri baik serangan dari luar maupun persoalan-persoalan internal.

Tanggungjawab Keamanan Distrik dan Nasional

Mengamati perkembangan pembangunan keamanan nasional tampaknya menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah dan civil society di Timor Leste. Bahkan tidak hanya keamanan nasional tetapi juga keamanan distrik dan sub-distrik. Pemerintah perlu membahas sebuah mekanisme tentang keamanan nasional dan distrik tersebut. Mulai ada kesadaran dalam masyarakat bahwa terciptanya keamanan nasional di Timor Lorosae merupakan tanggungjawab bersama. Sebagaimana kemerdekaan yang telah dicapai ini adalah hasil perjuangan kolektif bukan hanya kelompok atau orang tertentu tetapi adalah hasil dari seluruh perjuangan rakyat. Tetapi sebagai mana dijabarkan dalam konstitusi RDTL bahwa untuk keamanan nasional adalah tugas kepolisian dan untuk menangkul serangan dari luar adalah tugas F-FDTL. Masyarakat tampaknya belum mendapat penjelasan tentang bagaimana konstitusi dapat membedakan antara serangan luar and keamanan internal. Konstitusi kurang tersosialisasi dengan baik karena lemahnya pemerintah dan kurangnya sarana dan prasarana. Sehingga kadang masyarakat keliru melihat fungsi dan peran polisi dan F-FDTL. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri Timor Leste dewasa ini lebih pada ancaman internal dimana terdapat banyak konflik-konflik bersenjata seperti yang terjadi di Atsabe-Ermera pada tanggal 4 Januari 2003 yang menewaskan rakyat daerah itu. Melihat kejadian ini tentu masih merupakan tanggungjawab PNTL karena secara fungsional telah ditranfer kekuasaan dari UNPol ke PNTL pada tanggal 1 Desember 2002 dengan kekuatan PNTL mencapai 150 dan UNPol 1 (satu) orang. Untuk itu sudah saatnya PNTL memperbaiki dan berbenah diri untuk menghadapi gangguan keamanan dalam negeri karena rakyat sangat berharap dari lembaga tersebut.

“Yang bertanggungjawab atas keamanan di distrik adalah PNTL sedangkan nasional adalah tugas tugas F-FDTL bekerjasama dengan PNTL”, pengungsi, Ex-militer, 45, Quelicai.

Untuk menciptakan keamanan yang stabil di dalam negeri polisi harus menjadi contoh terbaik bagi masyarakat. Polisi harus dipercaya masyarakat demi penciptaan kewibawaan yang positif. Untuk menciptakan polisi yang dipercaya masyarakat maka polisi harus bersih dari noda-noda hitam masa lalu yang sangat membahayakan. Gangguan keamanan yang tercipta dewasa ini adalah implikasi dari semua kebijakan yang keliru dimasa lalu yang

memberikan peluang kepada “orang lama” dalam kepolisian. Kerawanan keamanan dalam negeri adalah akibat kebijakan masa CNRT yang membuka peluang kepada para polisi ex-Indonesia. Perekrutan polisi yang terdiri dari mantan anggota FALINTIL dan clandestine merupakan alternatif terbaik bagi terciptanya polisi yang loyal kepada Negara Republik Demokratik Timor Leste. Persoalannya akan menjadi berbahaya bagi penegakan hukum jika mulai ada degradasi kepercayaan rakyat kepada polisi akibat dari kebijakan diatas.

“Keamanan distrik adalah tugas polisi tetapi ini masih ada pertentangan karena polisi yang sekarang adalah juga polisi ex-Indonesia”, petani, 35, Ossu.

Keraguan terhadap keamanan dalam negeri juga disampaikan oleh rakyat, karena terlihat seperti terdapat dua nama dalam lembaga militer resmi yakni FALINTIL dan FDTL. Terbentuknya FALINTIL merupakan pertautan antara dua kekuatan besar yakni TROPAS (tentara Portugis yang terdiri dari orang-orang Timor Leste) dan militan FRETILIN pada tahun 1975 ketika terjadi kudeta yang dilakukan Union Democratica Timor (UDT). Dua kekuatan besar ini menginginkan kemerdekaan bagi Timor Leste. Atas dasar persamaan tujuan ini sehingga kedua kekuatan yang berbeda ini bersatu yang kemudian kita kenal dengan sebutan FALINTIL. Kelahiran Falintil bertujuan membebaskan Timor Leste dari kolonialisme Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam nama FALINTIL. Kata libertasaun yang terdapat dalam FALINTIL menunjukkan maksud itu. Dan satu persoalan yang mungkin bertentangan dengan prinsip profesionalisme tentara adalah ketika itu FALINTIL merupakan kekuatan bersenjata yang di naungi oleh FRETILIN sebuah partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan. Ketika perjuangan panjang terjadi FALINTIL secara konsisten ini mem bebaskan negeri Timor Lorosae dari penjajahan itu. Dibelahan dunia dan juga Indonesia nama militer sering membawa makna yang multi interpretasi. Seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) nama ini tidak mengandung sebuah makna yang jelas sehingga melahirkan Dwi Fungsi ABRI pada saat itu. Sedangkan di Timor Lorosae, kini lembaga resmi negara telah dibentuk yakni awalnya bernama FDTL yang mengandung makna pertahanan dan menutup peluang interpersi militer dalam politik karena secara maknawi jelas bertujuan pertahanan. Dan setelah konstitusi diresmikan pada tanggal 20 Mei 2002, nama FDTL ditambahi nama FALINTIL sehingga lembaga resmi militer Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL. Lembaga ini bertugas mempertahankan negara Timor Leste dari serangan luar. Kerjasama antara PNTL dan FFDTL diharapkan terjadi dan kedua institusi tersebut diharapkan dapat terjalin hubungan yang kordinatif sehingga salah faham antar kedua lembaga dapat dihindarkan. Fenomena perkelahian antara PNTL dan FFDTL yang terjadi di Mercado Lama Dili tanggal 8 November 2002 sangat bertentangan dengan keinginan rakyat secara keseluruhan.

“Yang bertanggungjawab atas keamanan di Timor Lorosae adalah harus F-FDTL. F-FDTL yang menjadi komando di Timor Lorosae dan Falintil telah menjadi F-FDTL. Jadi menurut berita yang kami dengar Falintil juga masih tetap ada, sedangkan ada juga F-FDTL. Apakah FALINTIL tidak sama dengan FDTL. Oleh karena itu, kami minta militer dalam suatu negara itu hanya satu nama saja. Kami tidak ingin Falintil dan FDTL saling bermusuhan”, petani, 40, Bobonaro.

Rakyat tampaknya sadar bahwa ancaman eksternal merupakan satu faktor yang harus diperhatikan bagi keutuhan wilayah Negara Republik Demokratic Timor Leste. Walaupun dalam perencanaan kekuatan bersenjata dikatakan bahwa pembangunan FDTL tidak harus dengan personil yang banyak tetapi membangun dengan kekuatan pertahanan yang kecil hanya bertugas mempertahankan negara sambil mengharapkan bantu militer dunia internasional. Namun rakyat tampak sangat mengharapkan terciptannya kekuatan bersenjata yang handal dalam tubuh F-FDTL sehingga rakyat menginginkan penambahan personil F-FDTL.

“Setelah penyerahan kedaulatan kepada Timor Lorosae maka sebelumnya pasukan F-FDTL harus diperkuat artinya diperbanyak personilnya untuk menjaga perbatasan antara Timor Lorosae dengan Indonesia, pengungsi, eks –militer, 45.

Tentara yang profesional adalah tentara yang tidak terlibat dalam politik. Keraguan terhadap independensi F-FDTL juga masih tertanam dalam hati secara umum. Karena di dalam tubuh F-FDTL sekarang adalah orang-orang sebelumnya menjadi pasukan pembebasan nasional atau FALINTIL yang pernah juga menjadi sayab bersenjata Fretilin. Sikap tidak netral F-FDTL dapat saja berakibat buruk buat masa depan hubungan sipil militer di Timor Leste. Oleh karena itu, independensi F-FDTL sangat penting bagi kelangsungan pembanguana demokrasi di Timor Lorosae. Independensi F-FDTL ini harus dibangun lewat sebuah disiplin kemiliteran yang kuat dan mendalam terutama pemahaman anggota-anggota F-FDTL itu tentang eksistensi mereka yang lintas suku, ras, agama kelompok dan partai politik. F-FDTL merupakan organ yang secara konsisten mempraktekan profesionalismenya yang juga sangat tidak tertarik dengan politik praktis.

“Setelah penyerahan kekuasaan tanggal 20 Mei nanti kami meminta kepada F-FDTL untuk mempertahankan posisinya harus benar-benar sebagai suatu lembaga yang independent. Tidak boleh berafiliasi ke dalam suatu organisasi atau partai politik. Sebab masih adanya konflik diantara lider-lider politik. Jika F-FDTL tidak independent dan pro-contra terhadap satu organisasi atau partai politik maka akan membawa maut bagi masa depan Timor Lorosae”, guru, 28, Quelicai.

Fungsi F-FDTL dan PNTL

Dalam menciptakan lembaga pertahanan yang kuat dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), pada saat ini pemerintah harus menciptakan sebuah aturan normatif yang dapat melindungi sekaligus mengatur ruang gerak pasukan F-FDTL agar gerak dan perlakuannya tidak menjadi bumerang bagi lembaga tersebut. Harapan rakyat terhadap F-FDTL memang sangat besar tetapi peralatan dan juga perlengkapannya sangat minim sehingga harapan yang diberikan terlampaui batas yang dimiliki F-FDTL. Pentingnya undang-undang tentang perlindungan terhadap pelaksanaan tugas F-FDTL dan PNTL disebabkan agar pelaksanaan tugas FDTL dan Police dapat dilindungi dan terhindar dari pelanggaran HAM

Secara umum masyarakat Timor Leste sudah mengerti tentang fungsi dan tugas F-FDTL. Namun fungsi dan tugas tersebut adalah bukan saja sesuatu yang hanya diucapkan tetapi harus diatur dengan berbagai macam aturan yang dikehendaki oleh rakyat dan pemerintah. Berdasarkan rencana yang diketahui umum bahwa pola perencanaan pembanguna F-FDTL adalah bahwa satu kompi di Lospalos yang kini dipimpin oleh Letkol Falur Rate Laek, kemudian kemungkinan di Baucau, Viqueque, Maliana, Suai (Zumalai). Ini berarti bahwa F-FDTL betul-betul menjadi pelindung bagi rakyat dan keutuhan wilayah RDTL walaupun dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

“Tugas F-FDTL adalah menjadi pagar negara Timor Leste, guru, 28, Quelicai.

Berkaitan dengan tugas F-FDTL, masih ada kerancuan antara tugas F-FDTL dan Police. Banyak masyarakat yang menghendaki F-FDTL tidak hanya bertugas sebagai sebuah kekuatan pertahanan negara dari ancaman eksternal tetapi menghendaki agar F-FDTL juga memberikan jaminan keamanan secara internal yang sesungguhnya adalah merupakan tugas PNTL. Barangkali pertentangan aspirasi rakyat yang diungkap oleh penelitian Focus Group ini dengan konstitusi disebabkan oleh belum tahunya mereka terhadap amanat konstitusi dan juga sebagai masih melekatnya budaya militer Indonesia yang merangkap sebagai stabilisator dan juga dinamisator selama Timor Leste menjadi koloni Indonesia.

“Menurut saya tugas utama F-FDTL adalah menjamin keamanan masyarakat Timor Leste dari ujung Timur sampai ke ujung Barat, disamping itu membantu masyarakat bila masyarakat mendapat kesulitan. F-FDTL harus bertanggungjawab atas pertahanan eksternal dan juga internal. Pertahanan eksternal seperti adanya ancaman yang datang dari luar untuk mengacaukan stabilitas keamanan dalam negeri, sedangkan pertahanan internal mereka harus berhati-hati dengan musuh yang ada ditengah-tengah masyarakat dan ini perlu adanya kerjasama dengan CIVPOL”, petani, 40 Bobonaro.

Proses pelaksanaan tugas F-FDTL juga harus dapat diawasi oleh rakyat dan juga oleh lembaga yang bertanggungjawab terhadapnya secara normatif. Pengawasan itu dapat dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan langsung rakyat atau bisa dilakukan dengan membentuk sebuah lembaga pengawasan dalam militer sendiri yang memiliki kemampuan lebih dan dengan tetap kordinasi dengan pemerintah sebagai lembaga sah pemerintahan sipil. Dengan pengawasan, militer dapat menyelenggarakan tugas dan perannya secara efektif sesuai dasar dan hukum yang berlaku.

“Yang memantau F-FDTL perlu dibentuk suatu wadah inteligen khusus yang berasal dari militer dengan keahlian khusus untuk memantau tingkah laku -FFDTL. Dan perlu juga dibentuk mahkamah militer sehingga jika F-FDTL melakukan pelanggaran terhadap hukum dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku”, pengungsi ex-TNI, 45, Quelicai.

Lembaga pengawasan yang dibentuk tersebut harus bertanggungjawab terhadap F-FDTL sendiri dengan memperhatikan disiplin yang dimiliki F-FDTL secara internal. Disiplin militer dikatakan ada jika telah tersusun yang biasa orang sebut dengan hukum militer. Dengan hukum militer tersebut para pimpinan militer akan mengukur sejauhmana anggota F-FDTL telah melanggar disiplin yang dimiliki F-FDTL. Disiplin ini penting karena dalam sejarah Timor Leste sebagaimana dilaporkan oleh King's College London bahwa pada tahun 2000 para pejabat UNTAET mulai prihatin dengan kemerosotan disiplin FALINTIL yang dimulai awal Januari 2000. Keprihatinan itu semakin hari semakin meningkat. Dalam bulan Mei-Juni 2000, khususnya terjadi peningkatan yang memprihatinkan atas terlibatnya anggota-anggota FALINTIL dalam berbagai insiden kekerasan.

“Militer harus dibawah hukum militer karena apabila melakukan pelanggaran maka yang menghukum adalah pengadilan militer. Militer harus mendengar atau mematuhi perintah Presiden melalui Parlemen, ke Menteri Pertahanan dan seterusnya”, petani, 41 Lospalos.

Hal yang sama juga diberlakukan kepada polisi. Eksistensi polisi harus diatur dalam sebuah undang-undang kepolisian sehingga pola kerja polisi sesuai dengan prosedur kepolisian. Dengan undang-undang tersebut fungsi kerja polisi dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

“Tugas utama polisi adalah menjaga keamanan dalam negara, seperti menjaga lalu lintas dan mampu memberikan keterangan yang jelas terhadap suatu kasus. Polisi jangan menciptakan sukualisme, fanatisme namun harus bertindak sesuai dengan hukum yang ada”, petani, 40, Bobonaro.

Pembayaran Militer dan Polisi

F-FDTL dalam laporannya menunjukkan bahwa memiliki anggaran yang minim dengan tetap mengharapkan bantuan dari negara-negara donor. Sebuah konferensi donor telah digelar di Dili tanggal 28 Agustus 2002 yang menghadirkan beberapa negara yang memberikan janji untuk membantu pembangunan F-FDTL guna menuju tentara professional. Dalam Kajian Independen Atas Opsi Angkatan Bersenjata bagi Timor Leste juga dikatakan bahwa untuk membangun tentara yang professional angkatan bersenjata mendapat anggaran dari pemerintah RDTL. Kita dapat memperhatikan setiap tahunnya sejak berdiri F-FDTL mendapat anggaran pertahanan dari pemerintah UNTAET kemudian UNMISSET yakni pada periode 2001-2002 F-FDTL mendapat USD 4.214 juta; periode 2002-2003 meningkat menjadi USD 4.429 juta; pada periode 2003-2004 mencapai USD 6.755 juta; pada periode 2004-2005 mencapai USD 6.835 juta; sampai pada periode 2005-2006 dengan tetap pada posisi USD 6.835 juta. Jumlah ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan anggaran militer sebagai sebuah dukungan penuh pemerintah kepada pembangunan militer F-FDTL.

“Yang bertanggungjawab akan jumlah anggaran yang harus digunakan untuk militer adalah kerjasama antara presiden, menhankam dan parlemen. Kemudian mengenai jenis senjata apa yang harus dibeli, ini tergantung pada keuangan negara”, guru, 26, Quelicai.

Anggaran yang ditetapkan dan untuk pembangunan militer Timor Leste merupakan tanggungjawab semua lembaga yang memiliki perhatian pada stabilitas nasional. Dengan eksistensi militer yang didukung secara umum, negara Timor Leste dapat terhindarkan dari ancaman eksternal yang kemungkinan dapat terjadi di masa depan. Anggaran menentukan profesional atau tidaknya militer F-FDTL.

“Walaupun Timor Leste adalah negara miskin apabila dia sudah menjadi suatu negara tentu berusaha mencari anggaran militernya karena dengan adanya militer maka suatu negara bisa terjamin. Sedangkan yang bertanggungjawab atas jumlah anggaran yang digunakan adalah Presiden dan menteri Pertahanan dan Keamanan”, pengangguran perempuan, 32, Baucau.

Dibanyak negara militer terlibat aktif dalam berbagai soal salah satunya adalah militer terlibat dalam bisnis. Sebab dari militer terlibat dalam bisnis ini beragam diantaranya adalah anggaran militer yang minim sehingga militer tertarik terlibat dalam bisnis untuk memenuhi kebutuhan kemiliterannya dan kesejahteraan anggotanya. Tetapi pada umumnya anggaran militer itu berasal dari pemerintah maka militer tidak diharapkan terlibat dalam bisnis apalagi politik praktis.

“Militer tidak diperbolehkan untuk berbisnis untuk memberi makanan kepada anggotanya dengan alasan bahwa apabila militer berbisnis maka tugas kemiliterannya tidak dilaksanakan dengan baik atau sepenuhnya”, guru, 35, Quelicai.

Tidak hanya dalam F-FDTL saja, sebagai lembaga yang memiliki fungsi menyerupai F-FDTL, Polisi juga harus mendapat anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan saran dan prasarana kepolisian dan juga kebutuhan anggotanya. Polisi memiliki tanggungjawab yang sangat berat yakni ia dapat menciptakan ketertiban juga penegakan hukum, sehingga polisi harus mendapat anggaran dari pemerintah.

“Bagi kami rakyat, kalau polisi berbisnis kami rasa tidak bisa. Ini tolong sampaikan kepada pemerintah apabila setelah 20 Mei 2002, kami tidak mau melihat dan mendengar F-FDTL dan Polisi terlibat dalam bisnis. Kami tidak mau seperti zaman rejim Orde Baru oleh Soeharto”, warga 38, Salale.

Militer, Polisi dan Politik

Tidak hanya dalam bidang bisnis tetapi militer juga tidak diperbolehkan untuk terlibat aktif dalam politik praktis umpamanya militer ikut mencalonkan orang tertentu dalam kandidat presiden atau umpamanya militer masuk dalam salah satu partai politik. FALINTIL memang dalam sejarah 1975 memiliki hubungan dekat dengan FRETILIN tetapi kini mereka harus memosisikan diri sebagai tentara yang netral dan berada ditengah-tengah semua golongan atau partai. Pada masa yang akan datang militer tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum karena kalau tidak militer akan terlibat dan memihak salah satu partai politik.

“Militer tidak diperbolehkan untuk memberikan suara politik secara umum dan memihak salah satu partai yang ada di Timor Leste karena militer merupakan pagar negara”, pengungsi, eks-TNI, 45 Quelicai.

Polisi hampir memiliki tugas yang sama dengan militer perbedaan militer dan polisi menurut konstitusi adalah militer memiliki tugas mempertahankan negara dari ancaman eksternal sedangkan polisi menciptakan ketertiban dan keamanan internal atau dalam negeri. Oleh karena itu polisi juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

“Polisi sebagai siguransa nasional dan sekaligus sebagai penegak hukum jadi polisi tidak diperbolehkan untuk mengikuti salah satu partai politik tetapi harus independen atau netral”, eks-kepala desa, 50, Quelicai.

Berpartisipasinya militer dan polisi dalam politik akan menunjukkan kepada masyarakat dan dunia luar bahwa tingkat profesionalisme militer dan

politik sangat rendah. Rendahnya tingkat profesionalisme itu akan berpengaruh kepada terciptanya stabilitas nasional bangsa ini.

IMPLIKASI-IMPLIKASI DAN PENGAMATAN TERHADAP TEMUAN-TEMUAN KELOMPOK TERARAH

Temuan-temuan kelompok *Focus Group* memiliki implikasi yang sangat berarti bagi jumlah individu maupun kelompok atau kelembagaan yang berpartisipasi dalam penciptaan dan pemeliharaan stabilitas nasional Timor Leste terutama pada saat PBB akan meninggalkan Timor Leste. Berikut ini adalah semua ringkasan dampak-dampak atau implikasi-implikasi dan pengamatan-pengamatan. Implikasi berikut ini berasal dari analisis diskusi *Focus Group*.

Implikasi bagi Pemerintah

- Walaupun telah terdapat pemahaman yang tinggi tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang tinggi namun dimasa yang akan datang pemerintah harus mengupayakan sarana dan prasarana untuk membentuk militer dan polisi yang profesional.
- Bagi rakyat Timor Leste ancaman yang sangat rawan adalah ancaman internal yakni persoalan-persoalan antar orang Timor sendiri sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menciptakan kesadaran hukum kepada rakyat secara keseluruhan.
- Tampaknya rakyat memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pemerintah untuk mengatur kerjasama antara polisi dan militer dalam sebuah mekanisme kerja yang baik dan efektif sehingga perbedaan pendapat antar institusi militer dan polisi tidak terjadi dimasa depan.
- Harapan terhadap desentralisasi keamanan oleh pemerintah pusat segera dilakukan pemerintah sehingga tanggungjawab keamanan sejalan dengan tanggungjawab struktur pemerintahan di seluruh distrik. Pemerintahan daerah yang efektif akan memudahkan pola kerjasama yang efektif bagi penciptaan keamanan di distrik dan sub-distrik.
- Pemerintah diharapkan tidak menggunakan militer dan politik untuk meniru pola perilaku militer dan polisi di negara yang menggunakan sistem pemerintahan otoriter untuk menindas rakyatnya. Pemerintah harus mengembangkan pola kontrol yang obyektif bagi lembaga yang bertanggungjawab kepada keamanan dan pertahanan.

Implikasi bagi Kepolisian RDTL (PNTL)

- Terdapat tingkat harapan yang tinggi dari rakyat terhadap PNTL. Rakyat beranggapan bahwa polisi adalah memiliki tanggungjawab

dalam bidang penciptaan stabilitas dalam negeri sehingga polisi harus siap menjunjung tinggi disiplin dan humanis bagi rakyat.

- Polisi juga harus menciptakan doktrin yang baik agar pola pikir yang selalu berbeda (berpikir dikotomis) dalam PNTL tidak diciptakan akibat kepentingan politik praktis yang berbeda. Para anggota PNTL harus tidak menciptakan sukuisme dan fanatisme dalam kepolisian. Polisi harus mengembangkan pola berfikir totalitas nasional yang berarti menjunjung tinggi kepentingan nasional bukan kepentingan kelompok.
- Masyarakat Timor Leste memperhatikan perilaku lembaga kepolisian untuk bekerjasama demi masa depan keamanan dalam negeri Timor Leste. Konstitusi mengamanatkan tanggungjawab keamanan terhadap kepolisian sehingga polisi harus memberi contoh yang baik dalam menjalankan tugas.
- Kepolisian negara harus tidak terlibat dalam politik praktis dan berbisnis karena hanya akan menyebabkan polisi lupa akan tugas utamanya. Kepolisian negara dewasa ini harus membuka diri bagi kontrol masyarakat terhadapnya.

Implikasi bagi F-FDTL

- Masyarakat Timor Leste melihat F-FDTL harus diatur dengan sebuah undang-undang agar mereka tidak terlibat dalam politik. Agar F-FDTL tidak terlibat dalam politik maka lembaga ini harus profesional untuk menunjukkan kenetralan intitusi.
- Rakyat melihat bahwa militer harus dipantau dengan membentuk sebuah lembaga yang sangat berkemampuan agar F-FDTL tidak keluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan itu militer tidak terlibat dalam politik dan bisnis.
- Sarana dan prasarana F-FDTL harus dilengkapi sebagai upaya membangun militer yang profesional dan anggota F-FDTL harus menjunjung tinggi disiplin korps dan tetap berada di barak.
- F-FDTL harus memiliki kekuatan untuk mengawasi perbatasan karena rakyat Timor Leste melihat bahwa ancaman yang juga bisa membahayakan wilayah Timor Leste adalah persoalan milisi dan penyelundupan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
- F-FDTL harus tidak terlibat dalam politik dan bisnis karena hak itu akan menyebabkan berhentinya usaha menuju tentara profesional.

Implikasi bagi Wakil Rakyat

- Rakyat berharap agar segera membuat sebuah undang-undang yang mengatur tentang posisi F-FDTL dan PNTL sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pertahanan dan keamanan. Dengan maksud bahwa undang-undang pertahanan dan keamanan bangsa Timor Leste sudah saatnya untuk dipersiapkan untuk menjelaskan maksud konstitusi dalam bidang pertahanan dan keamanan.
- Komisi yang membidangi persoalan Keamanan dan Luar negeri dalam parlemen nasional harus mengontrol eksistensi militer dan molisi agar tetap berjalan sesuai fungsinya yang dimanatkan konstitusi RDTL.
- Rakyat berharap agar Parlemen Nasional dapat membicarakan anggaran negara yang memberikan dukungan kepada anggaran pertahanan dan keamanan negara. Dimasa depan Parlemen harus memberikan perhatian khusus kepada anggaran pertahanan dan keamanan antara F-FDTL dan PNTL.

Implikasi bagi keamanan dan Pertahanan

- Rakyat berharap stabilitas nasional dapat diciptakan dengan memberikan tanggungjawab kepada F-FDTL dan kepolisian. Dewasa ini banyak kasus gangguan keamanan yang terjadi tetapi tidak diselesaikan secara baik sehingga sudah saatnya keamanan dan pertahanan diperjuangkan oleh seluruh rakyat.
- Rakyat melihat bahwa kerawanan banyak terjadi di perbatasan karena masih terdapat pengungsi dan milisi yang dapat menyusup masuk dan mengganggu keamanan internal. Penjagaan keamanan perbatasan penting untuk dilakukan.

Implikasi bagi PKF dan UNPol

- Sebagai lembaga internasional PKF dan UNPol (UNMISSET) dewasa ini belum memiliki kemampuan maksimal untuk mengatasi beberapa kerusuhan dan serangan dari luar. Sehingga sebelum masa berlakunya selesai pada bulan 30 Juni 2004, PKF dan UNPol harus menjalankan tugas dengan baik sebagai bukti partisipasi mereka sesuai perintah PBB.
- Kordinasi antar PNTL, UNPol, F-FDTL dan PKF belum berjalan baik sehingga kadang-kadang peralaksanaan operasioanl belum berjalan baik dan efektif. Untuk operasional dalam Area Operasi sebaiknya antara F-FDTL dan PKF dicampur agar efektifitas kerja dapat diciptakan.

APPENDIKS

Appendiks A – Catatan Mengenai Metodologi

Diskusi Kelompok Terfokus

Diskusi kelompok terfokus merupakan diskusi semi terstruktur dengan topik yang spesifik, yang dijalankan oleh moerator terlatih dengan kelompok antara enam hingga 15 peserta. Diskusi biasanya berlangsung selama dua jam.

Penelitian *focus group* NDI di Timor Lorosae

Sejak Januari 2001 NDI telah menggunakan teknik penelitian kelompok fokus untuk mengumpulkan informasi mengenai sikap masyarakat awam Timor Leste. NDI telah mempublikasikan tiga laporan diskusi kelompok. Laporan pertama, *Timor Lorosae Adalah Bangsaku*, pertama dipublikasikan pada bulan Februari 2001 bersamaan dengan Forum LSM Timor Lorosae. Yang kedua, *Membawa Aspirasi Rakyat*, ditulis bersama dengan Alacrico Da Costa Ximenes, dipublikasikan pada bulan Februari 2002. Laporan terakhir berjudul *Pemerintahan dalam Jangkauan* dipublikasikan pada bulan Februari 2003.

Laporan ini

Laporan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dari transkrip Bahasa Indonesia berdasarkan 11 diskusi kelompok dalam berbagai bahasa daerah dan di 8 Distrik antara 2 Mei 2002 dan 4 Juni 2002.

Profil peserta diskusi kelompok telah terangkum pada Appendiks B.

Jenis peserta hanya dimaksudkan sebagai deskripsi umum. Tanpa wawancara rinci dengan semua peserta, sulit untuk mengklasifikasikan pekerjaan mereka secara tepat karena beberapa kategori bisa berlaku atas orang yang sama. Misalnya, seseorang dapat bergabung dalam diskusi Civic Forum discussion sebagai bagian dari kelompok pemuda gereja, mereka juga akan melaksanakan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Orang yang sama mungkin menganggap dirinya sebagai pengangguran dan akan mencari pekerjaan yang dibayar jika memang tersedia.

Transkrip

Setiap diskusi kelompok direkam dengan alat perekam dan transkrip verbatim disusun oleh para fasilitator. Terdapat 154 halaman transkrip dalam Bahasa Indonesia untuk 11 diskusi kelompok terfokus untuk tujuan penelitian ini.

Para fasilitator

Delapan kelompok fasilitator telah menyelenggarakan diskusi kelompok. Dalam urutan abjad, para fasilitator adalah Santiago Freitas Belo, Deolindo Borges, Carolina Do Ceu Brito, Palmira Da. C. Guterres, Manuel da Silva Guterres, Marcelina Liu, Carmensita R. Machado, Antonio C.B. Mota, Maria Lindalva Parada, Adao Pires, Juliana Do Rego, Cesaltina Ligia Reis Do Rosario, Manuel da Silva, Angelmo Soares dan Cesar Ximenes.

Penghargaan

Pendanaan program NDI di Timor Leste telah disumbangkan oleh United States Agency for International Development (USAID) yang penting artinya bagi pelaksanaan penelitian ini.

Appendiks B – Profil Peserta

Tanggal	Distrik	Kelompok	Peserta	Pria	Perempuan	Jangkauan Usia
2 Mei 2002	Suai	Penduduk Desa	6	5	1	18-38
5 Mei 2002	Bobonaro	Penduduk Desa	6	4	2	31-60
5 Mei 2002	Manufahi	Pegawai Negeri Kesehatan	10	7	3	27-36
15 Mei 2002	Ermera	Pelajar	8	4	4	17-20
5 Mei 2002	Bobonaro	Petani	6	6	-	35-60
2 Mei 2002	Baucau	Pegawai Negeri	8	8	-	28-50
4 June 2002	Los Palos	Petani Dan Ibu Rumah Tangga	8	3	5	29-48
3 Mei 2002	Baucau	Pengangguran	8	-	10	17-54
9 Mei 2002	Viqueque	Petani	7	7	-	29-49
14 Mei 2002	Dili	Pelajar	6	3	3	21-25
23 Mei 2002	Dili	Kelompok Perempuan	6	-	6	23-47